



**NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atu Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Camat Silaut Nomor : 140/ /kpts-CS-PS/V/2020 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN TAHAP II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah **Rp.1.438.389.200,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua ratus rupiah,-*), berkurang sejumlah **Rp.58.131.700.00,-** (*Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Rupiah*) sehingga menjadi **Rp.1.380.257.500,00,-** (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

1.1	Pendapatan Asli Nagari (PAN)		
	a. Semula	Rp.	4.000.000,00
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah PANagari setelah perubahan	Rp.	4.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	1.438.389.200,00
	c. Betambah / (berkurang)	Rp.	(58.131.700,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	1.380.257.500,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Nagari yang Sah

	a. Semula	Rp.	1.350.000,00
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapaatn Nagari	Rp.	1.350.000,00
2.	Belanja Nagari		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pem.Nagari		
	c. Semula	Rp.	531.524.802,00
	d. Betambah / (berkurang)	Rp.	(34.466.950,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	497.057.852,00
2.2	Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp.	584.872.000,00
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	(103.237.600,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	481.634.400,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	237.608.3500,00
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	(46.294.250,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	191.314.1000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	c. Semula	Rp.	87.295.457,62
	c. Betambah / (berkurang)	Rp.	(62.193.900,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.101.557,62
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	2.000.000,00
	d. Betambah / (berkurang)	Rp.	188.061.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	190.061.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.385.168.909,62
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	4.911.409,62
3.	Pembiayaan Nagari		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	54.911.409,62
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	54.911.409,62
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	50.000.000,00
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.911.409,62
	Surplus / Defisit Anggaran Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sungai Pulai.

Ditetapkan di : Silaut III

Pada tanggal : 19 September 2020



Diundangkan di : SUNGAI PULAI

Pada tanggal : 19 September 2020

Sekretaris Nagari Sungai Pulai

SITI JUNAINI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN 2020 NOMOR